

FISIP telah berdiri. Tiga program studi direposisi. Fakultas ke-11 di lingkungan UIN Jakarta ini ingin lulusannya berkualitas. Ke depan, FISIP diharapkan membuka kajian tentang (umat) Islam dan politik di Timur Tengah, khususnya.

BAKDA DHUHUR, KAMIS, 23 Desember 2010. Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Jalan Ir. H Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, ramai tidak seperti biasanya. Mahasiswa, dosen, karyawan, para tamu undangan, dan sivitas akademika memadati kampus dan berkumpul di Auditorium Prof Dr Harun Nasution. Mereka mendengarkan kuliah umum *Lecture Series on Democracy* bertema "Ekonomi dan Demokrasi", yang disampaikan Wakil Presiden Boediono. Hajatan akbar ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Boediono mengatakan sistem politik yang cocok untuk kemajuan bangsa Indonesia yang berkelanjutan adalah demokrasi. "Bagi saya, demokrasi adalah sistem yang dapat memenuhi falsafah *Manunggaling Kawula Gusti*, menyatunya kehendak rakyat dengan kehendak penguasa," katanya. Ia menegaskan, sistem demokrasi yang sudah berlangsung selama duabelas tahun harus dipertahankan dan dilanjutkan. Mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko, yaitu di antaranya bisa menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar.

Kedatangan Boediono disambut Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat, Dekan FISIP Prof Dr Bahtiar Effendy dan para sivitas akademika UIN Jakarta. Boediono tiba di UIN Jakarta pukul 14.50 dan menyapa mahasiswa dengan lambaian tangan seraya menerbar senyum.

Pada saat yang sama, di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Jalan Kertamukti, Pisangan, Tangerang Selatan, Banten, ada sesuatu yang baru. Di sana terlihat pembangunan sebuah gedung. Pemasangan tiang pertama pembangunan gedung itu dilakukan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Selasa, 5 September 2010.

Itulah gedung FISIP yang dibangun di lahan sekitar 10.000 meter persegi. Pembangunan gedung berlantai enam itu rencananya menghabiskan anggaran Rp 90 milyar. Di lahan tersebut sebelumnya berdiri bangunan yang berfungsi sebagai Kantor Penghubung atau Perwakilan Pemprov Jawa Barat di Jakarta. Kini, lahan itu diserahkan kepada UIN Jakarta untuk dimanfaatkan dan dikelola.

Kedua kegiatan itu, *Lecture Series on Democracy* dan





# Reposisi Sesuai Rumpun Akademik



pembangunan gedung, merupakan langkah lanjutan untuk pengembangan FISIP di masa-masa mendatang. Dalam setahun lebih, fakultas terbaru di UIN Jakarta ini memang terus berbenah; mulai dari reposisi program studi (prodi), review kurikulum dan matakuliah, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, hingga pembentukan lembaga kemahasiswaan.

Memang, banyak program dan tugas yang harus diwujudkan fakultas ini. Kerja keras tak bisa dihindarkan. Ini karena FISIP belum lama diresmikan, yaitu pada Sabtu 27 Juni 2009. Peresmian FISIP ini “diikutsertakan” pada pengukuhan Prof Dr Bahtiar Effendy sebagai gurubesar bidang ilmu politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (kini Fakultas Ushuluddin).

Lahirnya FISIP berawal dari program UIN Jakarta untuk menata program studi. Saat itu, Prodi Hubungan Internasional (HI) berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)—kini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) dan Prodi Sosiologi Agama (SA) di Fakultas Ushuluddin (FU). Di beberapa perguruan tinggi, prodi-prodi itu berada di naungan FISIP, bukan di FEB dan FU seperti di UIN Jakarta. Penataan prodi itulah yang menjadi salah satu dasar berdirinya FISIP. Sebab, jika prodi tersebut digabungkan di FISIP, hal itu bisa mempermudah pengembangan akademik dan rumpun keilmuan, sehingga pemanfaatan dan pengelolannya bisa berjalan lebih baik dan efisien.

“Saya kira dengan disatukan dalam satu rumpun ilmu yang sama, maka sumber daya dosen, perpustakaan, mau-

pun yang lain bisa disatukan. Sebelumnya ketiga prodi ini tersebar di dua fakultas sehingga menyusahkan dalam koordinasi dan bertukar dosen. Jadi, pendirian FISIP memang ada kaitannya dengan penataan prodi,” jelas Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr Jamhari, MA yang juga menjadi ketua Tim Pendirian FISIP. Menurut Jamhari, selain unsur administratif akademik, pendirian FISIP juga berkaitan dengan mimpi untuk menjadikan UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi kelas dunia.

Hadirnya FISIP bukanlah hal yang tiba-tiba. Dua tahun lalu, tepatnya Desember 2008, digelar diskusi mengenai untung-rugi serta positif-negatifnya mendirikan FISIP. Ternyata Senat Universitas menyetujui. Maka dibentuklah Tim Pendirian FISIP berdasarkan SK Rektor nomor 113 tahun 2009, yang terdiri dari 22 orang, diketuai Dr Jamhari, MA, dengan sekretaris Dr Achmad Syahid, MA.

Konsep-konsep pendiriannya pun digodok secara matang dalam Workshop Pendirian FISIP pada 2 Februari 2009. Workshop ini menghadirkan pakar politik dan komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Depok seperti, Prof Dr Maswadi Rauf, Prof Dr M. Alwi Dahlan dan Drs Andrinof Chaniago, M.Si, serta dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dr Muchlis Hamdi, MPA.

Ada empat masukan yang dihasilkan dalam workshop tersebut. Pertama, penyamaan persepsi tentang nomenklatur FISIP yang khas Indonesia dan berbeda dari universitas lainnya. Kedua, pembahasan mengenai kurikulum yang standar dengan perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. Ketiga, perumusan proses pemindahan pro-

gram studi dari fakultas lain ke FISIP. Keempat, pemenuhan sarana prasarana yang mencakup gedung untuk ruang kelas, ruang dosen, dan sarana prasarana lainnya.

Berdasarkan masukan tersebut, tim kemudian menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan naskah akademik, reposisi dan izin penyelenggaraan program studi. Setelah diajukan, izin tersebut didapatkan melalui Keputusan Dirjen Pendis Nomor Dj I/93/2010 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Politik dan Sosiologi pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Surat keputusan ini memperkuat surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 75/D/T/2010, tertanggal 22 Januari 2010, tentang Persetujuan Permohonan Reposisi Prodi Pemikiran Politik Islam menjadi Prodi Ilmu Politik (IPol) dan Prodi Sosiologi Agama menjadi Prodi Sosiologi.

Sementara, Prodi Hubungan Internasional lebih mulus bermigrasi dari FEIS ke FISIP dengan SK Pendirian yang lama. SK reposisi tersebut dijadikan dasar pendirian FISIP. Selanjutnya, Menteri Agama RI melalui suratnya tanggal 27 Juli 2010 mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk menyetujui usulan pembentukan FISIP.

“Izin dari Menteri Agama sudah keluar. Begitu pula izin dari Mendiknas. Sekarang kita sedang menunggu SK dari Menpan. Pada dasarnya, jika kedua menteri ini sudah mengizinkan, itu sudah cukup. Izin Menpan berkaitan dengan tunjangan dekan dan pejabat lainnya agar bisa diambilkan anggarannya dari negara. Itu saja. Kalau masalah

izin prinsipil, yang pokok itu kan prodinya bukan fakultasnya. Kalau prodinya sudah dapat izin dan diakreditasi, itu sudah cukup,” tutur Jamhari.

Sebelum “migrasi” ke FISIP, Prodi PPI telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A dari BAN-PT berdasarkan SK BAN PT No. 009/BAN-PT/Ak-X/S1/IV/2007. Prodi PPI dibuka di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sejak tahun akademik 1999/2000. Penyelenggaraan Prodi PPI ini dikuatkan dengan SK Rektor No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 26 April 2000. Kemudian dikuatkan lagi oleh SK Dirjen Bagais No: DJ.II/235/2003 yang ditandatangani Dr. H.A. Qodri Azizy, MA pada tanggal 16 Juli 2003.

Sementara Prodi Sosiologi Agama juga mengantongi nilai akreditasi A berdasarkan SK BAN PT No.009/BAN-PT/Ak-X/IV/2007. Bersama PPI, prodi ini beroperasi sejak tahun ajaran 1999/2000, yang ketika itu masih “dititipkan” pada Jurusan Perbandingan Agama, dengan SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 30 Tahun 2000. SK tersebut kemudian diperkuat dengan SK Dirjen Bagais Departemen Agama RI No. DJ.II/165/2002 dan telah diperpanjang berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/202/2008.

Prodi Hubungan Internasional mulai dibuka pada tahun akademik 2005/2006. Prodi ini memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. DJ.II/243/2006 tanggal 11 Juli 2006. Prodi Hubungan Internasional bertujuan menyiapkan





kan sarjana yang menempatkan dirinya sebagai pembuka wawasan dan cakrawala dunia internasional yang diarahkan pada terwujudnya tujuan nasional berbangsa dan bernegara.

Mengapa Prodi PPI perlu reposisi? Menurut Ketua Lembaga Peningkatan Jaminan Mutu (LPJM), Dr Achmad Syahid, MA yang juga sekretaris Tim Pendirian FISIP, ada lima alasan yang menjadi dasar reposisi Prodi PPI menjadi Prodi Ilmu Politik.

*Pertama*, bahwa untuk pendidikan tingkat sarjana (S1), diperlukan pemberian dasar-dasar keilmuan kepada peserta didik agar mereka mendapatkan pengetahuan yang luas pada disiplin ilmu yang dipelajari. Dalam konteks *IAIN with wider mandate*, pendirian Prodi PPI pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memang sangat relevan, karena studi politik yang dilakukan masih menekankan pada bidang pemikiran Islam, bidang yang selama ini menjadi domain fakultas tersebut. Namun, dengan berubahnya IAIN menjadi UIN, dan didirikan pula fakultas yang secara khusus mengelola disiplin ilmu sosial, maka akan lebih baik bila Prodi PPI direposisi menjadi Prodi Ilmu Politik dan lebur ke dalam fakultas baru itu, sehingga materi pendidikan dan pembelajaran di dalamnya dapat dikembangkan lebih optimal.

*Kedua*, sebagian besar sumber daya manusia (dosen) yang dimiliki Prodi PPI berlatar belakang ilmu politik (*political science*), di samping berlatar belakang pemikiran politik Islam (*Islamic political thought*). Perubahan nomenklatur sesungguhnya tidak akan membawa program studi tersebut menjadi jauh berbeda dari program studi sebelumnya. Bahkan dengan menjadi Prodi Ilmu Politik, yang terkesan le-

bih bersifat umum dan lazim diterima masyarakat Indonesia, prodi tersebut akan memiliki kekhususan kajian politik Islam sebagai keunggulan komparatifnya (*comparative advantage*).

*Ketiga*, pasca peristiwa 9/11, Islam sebagai fenomena sosial dan politik sedang menjadi kajian yang *trendy* di universitas-universitas dan lembaga-lembaga

kajian ternama di dunia, khususnya di Barat. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk mendalami masalah tersebut dengan mengundang para pakar Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Para pakar dari Indonesia ini kebanyakan berkhidmat di berbagai perguruan tinggi Islam negeri. Namun, institusi fakultas yang mewadahi kegiatan mereka masih merupakan institusi lama, berupa fakultas-fakultas agama, yang tingkat relevansi keilmuannya tidak cukup meyakinkan dibanding jika mereka bernaung di FISIP.

*Keempat*, sebagaimana telah disebutkan, secara administratif Prodi PPI telah mengantongi izin penyelenggaraan dan memperoleh akreditasi dengan peringkat nilai A. Dengan telah mendapatkan akreditasi dari Depdiknas, maka sesungguhnya hal tersebut juga merupakan pengakuan terhadap kelayakan penyelenggaraan program studi tersebut di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Kelima*, berdasarkan *cyber survey* yang dilakukan LPJM UIN Jakarta, universitas-universitas terkemuka, seperti Oxford University, Harvard University, Australian National University, Ohio State University, dan lain-lain, memiliki Prodi (*Department*) Ilmu Politik (*Political Science*), baik yang bernaung di Faculty of Social Sciences maupun di Faculty of Art. Perguruan tinggi negeri di Indonesia yang tercatat menyelenggarakan Prodi Ilmu Politik adalah Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Andalas Padang, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Hasanuddin Makassar.

Sementara beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia tidak menyelenggarakan Prodi Ilmu Politik, tetapi menyelenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Lampung, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Universitas Mulawarman Samarinda.

Di wilayah Jakarta, perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Prodi Ilmu Politik adalah Universitas Muhammadiyah, Universitas Nasional, dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP). Kebanyakan universitas swasta di Jakarta lebih tertarik membuka Prodi Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Ilmu Administrasi dibanding Prodi Ilmu Politik.

Dari survei tersebut dapat disimpulkan, peluang dan prospek UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi kiblat pengembangan ilmu politik di Indonesia, khususnya politik Islam, sangatlah besar. Apalagi universitas ini juga telah memiliki tekad untuk menjadi jendela keunggulan akademis Islam Indonesia (*window of academic excellence of Islam in Indonesia*).

“Prodi Ilmu Politik di UIN Jakarta mengembangkan ilmu politik dengan kekhususan politik Islam yang terintegrasi dengan realitas politik Indonesia. Keberadaan prodi ini sangat penting, karena jika berbicara mengenai realitas politik di Indonesia maka masalah politik (umat) Islam tidak bisa diabaikan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,” jelas Syahid.

Mengapa Prodi SA perlu reposisi? Ada beberapa alasan. *Pertama*, harapan menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu *research university* dan *world class university* sebagaimana amanat Statuta UIN Jakarta harus ditopang dengan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang diakui di tingkat internasional. *Kedua*, setiap disiplin ilmu mempunyai komunitas keilmuan (*scientific community*) sendiri, yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang berinteraksi antara satu dengan lainnya, saling membagi prinsip-prinsip etik, kepercayaan dan nilai, teknik, serta harapan karir profesional. Komunitas keilmuan dibangun salah satunya berdasarkan disiplin keilmuan. Dan sosiologi telah menjadi salah satu disiplin yang diakui secara internasional.

*Ketiga*, adanya tuntutan para pengguna jasa (*user* dan *stakeholders*) akan variasi prodi yang ditawarkan

UIN Jakarta. Seperti diketahui, lulusan SLTA dewasa ini, baik SMU maupun MAN, bahkan beberapa madrasah aliyah di lingkungan pondok pesantren, berasal dari berbagai jurusan (pengelompokan disiplin ilmu) seperti ilmu agama dan ilmu pengetahuan bahasa. Pengelompokan disiplin keilmuan di tingkat SLTA semacam ini menuntut UIN Jakarta untuk menyiapkan prodi yang bervariasi pula, salah satunya Prodi Sosiologi. Dengan cara ini diharapkan UIN Jakarta dapat menawarkan “produk” yang sesuai dan selaras dengan permintaan pasar (*market*) dan menghasilkan lulusan yang diakui pasar.

*Keempat*, perguruan tinggi dari beberapa negara mulai ramai membuka cabang di tanah air. Ini berarti di dunia pendidikan tinggi di Indonesia mulai hadir “pemain” asing yang sangat mungkin merupakan pemain profesional di bidangnya. Fenomena ini tentu saja semakin meningkatkan iklim persaingan di kalangan perguruan tinggi nasional. Kondisi ini bagi UIN Jakarta jelas merupakan suatu tantangan untuk membenahi diri dalam rangka membangun keunggulan spesifik (*distinctive competence*) dengan mengembangkan berbagai prodi unggulan guna memperoleh kemampuan bersaing yang tinggi (*competitive advantage*).

*Kelima*, adanya peluang otonomisasi yang lebih luas kepada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan pengkaderan pemimpin-pemimpin masa depan. Hal ini bagi UIN Jakarta merupakan momentum yang perlu segera direspon dengan langkah-langkah konkrit ke arah pengembangan dan peningkatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem manajemen yang profesional, terbuka, mandiri, dan de-





mokratis.

*Keenam*, keinginan pengelola FISIP UIN Jakarta untuk mengubah paradigma kajiannya dengan upaya modifikasi antara yang normatif dan empiris. Dan, kajian sosiologi dianggap tepat untuk merespon keinginan tersebut. Keinginan ini dipicu oleh realitas banyak alumni Prodi Sosiologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkiprah dalam bidang pengembangan masyarakat dengan bekerja di berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka pada umumnya terampil dalam melakukan perencanaan, penelitian, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat, sehingga mereka cukup diakui kontribusinya dalam membangun keberadaan masyarakat. Namun harus diakui bahwa *skill* dan *achievement* mereka sebenarnya tidak didapat melalui pendidikan formal di fakultasnya. Karena itu, mempersiapkan calon-calon yang handal dalam *community development* melalui sebuah kelembagaan terasa esensial.

Prodi Hubungan Internasional, seperti disebutkan di atas, awalnya berada di lingkungan FEIS, dan direposisi ke FISIP. Selama ini, kurikulum prodi ini mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tujuannya untuk memacu mahasiswa agar tak hanya mengembangkan pengetahuan dan keilmuan tentang hubungan internasional, tetapi juga memiliki kemampuan dan pengalaman praktis yang siap bekerja di lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan pendidikan Prodi Hubungan Internasional berorientasi pada tuntutan global, yaitu kecenderungan berkembangnya hubungan ekonomi politik internasional dan hubungan politik strategis internasional. Untuk menjawab tuntutan tersebut, maka prodi ini menyediakan tiga peminatan, yaitu ekonomi politik internasional, pengkajian strategis internasional, dan diplomasi. Kajian strategis ini diperkuat dengan nilai-nilai keislaman sehingga lulusannya tidak hanya memiliki *skill* dan keilmuan, tapi juga spiritualitas yang kuat.

Reposisi atau “migrasi” ketiga prodi tersebut—Prodi PPI menjadi Prodi IPol, Prodi Sosiologi Agama menjadi Prodi Sosiologi, dan Prodi Hubungan Internasional—ke FISIP UIN Jakarta, adalah langkah yang sangat cepat dan tepat. Prodi-prodi ini telah ditempatkan sesuai dengan rumpun bidang keilmuannya.

Awalnya ada beberapa prodi yang hendak dimigrasi ke FISIP. Misalnya, Prodi Kesejahteraan Sosial (Kessos) dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) dan Prodi Siyasah Syar’iyah dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Namun, pihak FSH mengatakan, kurikulum dan matakuliah di Prodi Siyasah Syar’iyah lebih menekankan pada pemahaman hukum dan ketatanegaraannya, bukan politik taktis seperti yang dimiliki Ilmu Politik. Sementara Prodi Kessos, izin prodinya belum keluar.

Menurut Jamhari, sebenarnya tidak ada kesulitan dalam pendirian FISIP. Tapi memang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan kerja keras. Kementerian Agama memahami pentingnya FISIP. Ditambah lagi dukungan kalangan akademisi dari luar UIN Jakarta yang



cukup tinggi. “Tidak ada halangan dan tidak terlalu silit. Namun jika mau dianggap sebagai kendala, hal itu mungkin terkait dengan prosedur birokrasi yang cukup lama, menunggu persetujuan ke berbagai lembaga,” kata Jamhari.

Jahmari yakin FISIP akan semakin mapan dari tahun ke tahun. Banyak hal yang mendasari keyakinannya. Di antaranya peluang kegiatan yang cukup besar. Peluang itu terlihat sejak pasca Orde Baru. Peluang itu terkait dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, yang selalu dikaitkan dengan mayoritas umat Islam. Hingga saat ini masih ada kalangan tertentu yang meragukan apakah Islam *compatible* dengan demokrasi. Nyatanya, (umat) Islam di Indonesia bisa *hand in hand* dengan demokrasi. Hingga 2010, demokrasi bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, seperti dikatakan Wapres Boediono di hadapan sivitas akademika FISIP.

Selain itu, sekarang Indonesia menjadi *living laboratory for Islam and democracy* atau laboratorium hidup untuk studi tentang Islam dan demokrasi. “Ini luar biasa. Apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya partai politik Islam dan pilkada, dan seterusnya. Dunia Islam menjadi sorotan, bagaimana relasi hubungan internasional antara Islam dan Barat. Islam di Indonesia ini cukup unik, karena dekat dengan Timur Tengah dan Barat. Ini momentum yang sangat baik. Makanya, kami optimis dengan kekhasan ini. Kita bisa cepat maju,” jelas Jamhari.

Optimisme Jamhari beralasan, sebab FISIP memiliki figur-figur yang menjadi rujukan untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia. Sebut saja, Bahtiar Effendy yang menjadi dekan FISIP saat ini, telah menulis



banyak buku tentang politik. Bahtiar juga memiliki latar belakang *political science* yang mapan. Ada juga Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Bambang Pronowo, dan Saiful Mujani. Mereka memiliki kelebihan secara akademik, karena mereka paham betul tentang sosiologi umat Islam, ajaran-ajaran Islam, dan sekaligus mempelajari ilmu politik yang mapan.

“Kita juga membayangkan lulusan-lulusan FISIP mampu memahami sosiologi umat, prinsip-prinsip Islam, dan *political science* yang baik. Nanti, jika FISIP sudah mapan, saya kira, kita akan mengembangkan kajian atau pusat studi tentang Islam dan politik di Timur Tengah. Kalau ada kasus di Iran, Irak, atau Saudi Arabia, kita bisa berkomentar, karena kita mempelajari dan mengkajinya,” tutur Jamhari. Tampaknya, inilah “buah” reposisi dan migrasi ketiga prodi ke FISIP, yang akan dipetik di kemudian hari.[] ELLY AFRIANI







## Mencetak **Ahli Politik Plus**

Mahasiswa diajarkan matakuliah mengenai dasar-dasar keislaman yang tak diajarkan di fakultas sejenis di kampus lain. FISIP ingin melengkapi dan mengisi hal-hal yang selama ini kurang menjadi perhatian lembaga lain. Bukan sekadar alternatif, tapi pilihan utama.

PAGI ITU, PUKUL 10, di Auditorium Utama (sekarang Auditorium Prof Dr Harun Nasution). Suasananya tampak berbeda dari hari-hari biasa. Sejumlah tokoh nasional, seperti Akbar Tandjung, Jimly Ashshiddiqy, Ahmad Syafi'i Maarif, Ryaas Rasyid, Fuad Bawazier, dan Sofyan Djalil memasuki auditorium. Kedatangan mereka untuk menghadiri hajatan bersejarah.

Ya, mulai tahun akademik 2009-2010, UIN Jakarta

kembali menancapkan tonggak sejarah pengembangan lembaganya. Pada 27 Juni 2009 bertepatan 4 Rajab 1430 Hijriah, di auditorium itu, UIN Jakarta secara resmi membuka fakultas baru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). *Launching* FISIP dilaksanakan berbarengan dengan pengukuhan gurubesar bagi Bahtiar Effendy dalam bidang ilmu politik, yang kemudian didaulat menjadi dekan pertama FISIP. Pendirian FISIP berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 162 Tahun 2009 tentang Pembukaan FISIP.

Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr Jamhari mengatakan, ada beberapa faktor latar belakang pendirian FISIP UIN Jakarta. Katanya, pendirian FISIP untuk mengumpulkan keilmuan yang serumpun. Menurutnya, sebelum FISIP berdiri, UIN Jakarta sudah memiliki sejumlah program studi yang serumpun tentang ilmu sosial dan ilmu politik, tetapi terpecah dalam beberapa fakultas, sehingga menyulitkan pengembangan prodi itu sendiri.

Misalnya, Prodi Hubungan Internasional di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (kini Fakultas Ekonomi dan

Bisnis), Prodi Pemikiran Politik Islam dan Prodi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF). "Pembukaan FISIP ini terkait dengan beberapa prodi yang dulu memang sudah dirintis untuk menjadi FISIP. Jadi pada dasarnya pembukaan FISIP bukan mendadak," kata Jamhari.

Jamhari menjelaskan, pembukaan FISIP terkait proses pengembangan prodi di UIN Jakarta agar sesuai dengan disiplin keilmuan internasional. UIN Jakarta ingin menyesuaikan nomenklatur prodi yang dimilikinya agar sesuai dengan standar internasional.

Bahkan, Jamhari menegaskan, pembentukan FISIP terkait dengan kajian politik Islam yang komprehensif. Menurutnya, kajian politik Islam di dunia Islam sendiri masih sangat rendah bahkan bisa dikatakan kajiannya di beberapa perguruan tinggi Islam belum menyentuh pada kajian empirik. Kebanyakan studi politik Islam di dunia Islam lebih merujuk pada kajian karya-karya pemikir Islam klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi dan pemikir Islam klasik lainnya. "Sementara kajian yang lebih kontemporer atau empirik, seperti demokrasi dan lainnya, tidak ada," tuturnya.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia perlu memiliki lembaga yang secara khusus melihat perkembangan politik di negara-negara Islam supaya kelak kehidupan politik di negara Islam bisa berkembang secara baik. Ia mencontohkan, sekarang di Indonesia sedang terkonsolidasi antara Islam dengan demokrasi dan beberapa negara Islam sudah mulai memakai demokrasi sebagai landasan negaranya. Fenomena tersebut memerlukan kajian tersendiri yang komprehensif.

"Kita melihat ini sebagai kelebihan FISIP UIN Jakarta. Jika nanti FISIP bisa mengembangkan kajian khusus politik di negara Islam, maka diharapkan bisa menjadi ikon bagi perkembangan politik Islam," ungkapnya.

Dekan FISIP UIN Jakarta Prof Dr Bah-tiar Effendy mengatakan pembukaan FISIP bukan untuk adu gengsi terhadap kampus lain, melainkan untuk mewujudkan bangunan epistemologi keilmuan Islam. Sebab dalam Islam tak dikenal pemisahan ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum. "Nah, kita ingin mengintegrasikan keduanya meskipun ada perbedaan-perbedaan, misalnya ilmu politik dan ilmu syaria. Itu berbeda. Tapi dalam Islam, keduanya secara epistemologis tak dapat dipisahkan,"

katanya.

Bah-tiar menjelaskan integrasi keilmuan hingga sekarang masih belum terwujud. Untuk merealisasikannya dibutuhkan waktu, kerja keras, dan kajian epistemologis yang mendalam sehingga suatu saat cita-cita tersebut bisa terwujud. Mengutip Quraish Shihab, katanya, UIN Jakarta masih dalam tahap menyandingkan keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, tapi belum pada tahap integrasi.

Lalu, apa diferensiasi dan kelebihan FISIP UIN Jakarta jika dibandingkan dengan FISIP universitas lain? Jamhari mengatakan, saat ini pihak rektorat sedang merancang beberapa hal yang akan dijadikan keunikan atau distingsi FISIP UIN Jakarta. Di antara rancangan tersebut, FISIP UIN Jakarta akan melihat Timur Tengah dan konflik Palestina dari sudut pandang komprehensif, yakni paradigma agama/fikih dan politik.

Kelebihan lainnya, beberapa dosen FISIP UIN Jakarta memiliki kemampuan kuantitatif. Sebut saja, Saiful Mu-





jani, Din Syamsuddin, dan Bahtiar Effendy merupakan tenaga pengajar yang menekankan pada penelitian kuantitatif dengan survei dan statistik serta menggunakan pendekatan *behaviorial studies*. "Selama ini jika melihat beberapa FISIP kampus lain, kuantitatifnya tidak begitu kuat. Maka, dari sudut itu kita memiliki keunggulan," katanya.

Jamhari menegaskan masyarakat ingin melihat perkembangan politik Islam di Indonesia karena negara ini diakui atau tidak dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Menurutnya, politik di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa memahami sosiologi umat Islamnya. "Kebetulan saja kita mempelajari sosiologi umat dalam waktu yang cukup lama. Saya kira ini akan menjadi keunggulan yang susah ditandingi universitas lain," tegas doktor antropologi dari Australian National University (ANU), Australia ini.

Sedangkan Bahtiar mengungkapkan, distingsi fakultasnya terletak pada dasar-dasar keislamannya. Matakuliah atau pengetahuan dasar mengenai keislaman akan diberikan lebih dahulu supaya pohon-pohon ilmu sosial dan ilmu politik bisa dikembangkan sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sekuler.

Dilihat dari struktur lembaganya, FISIP UIN Jakarta masih cukup sederhana, mengingat usianya yang masih seumur jagung. Pengelolaan FISIP UIN Jakarta hanya dipimpin oleh dekan dan seorang wakil dekan. Sementara jika melihat komposisi pimpinan FISIP UI dan FISIPOL UGM sangat berbeda karena usia mereka sudah lumayan tua. Di FISIP UI dan FISIPOL UGM pengelolaan lem-

baganya dipimpin oleh dekan dan beberapa wakil dekan.

Menurut Bahtiar, meski komposisi pimpinan lembaganya sederhana tetapi itu dinilai sudah cukup, paling tidak untuk beberapa tahun ke depan. "Ini tidak terlalu jadi masalah, semua kegiatan masih bisa terlaksana dengan baik," cetusnya.

N o m e n k l a t u r prodi di FISIP UIN Jakarta dengan FISIP UI tak ada perbedaan. Tapi jika dibandingkan dengan FISIPOL UGM sedikit berbeda. FISIP UIN Jakarta

memiliki tiga prodi yakni Ilmu Politik, Sosiologi, dan Hubungan Internasional. Di FISIP UI prodinya terdiri dari Ilmu Politik, Sosiologi, Hubungan Internasional, Komunikasi, Administrasi, Kriminologi, Kesejahteraan Sosial, dan Antropologi. Sementara itu, nomenklatur prodi FISIPOL UGM; Politik dan Pemerintahan, Sosiologi, Ilmu Hubungan Internasional, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Komunikasi, dan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Jumlah prodi FISIP UIN Jakarta memang masih sedikit, tapi di masa mendatang jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan.

"Nanti kita akan buka Prodi Antropologi, Ilmu Pemerintahan, *Public Diplomacy*, dan *Strategic Studies*. Tapi itu belum dipikirkan, karena sekarang kita sedang konsentrasi pada penguatan lembaga dan *software* kurikulum, peningkatan pelayanan mahasiswa, dan peningkatan kualitas dosen," tutur Bahtiar.

Dalam struktur kurikulum, mahasiswa FISIP UIN Jakarta di semua prodi akan menempuh beban SKS sebanyak 145 SKS selama delapan semester. Bobot SKS tersebut tak jauh berbeda dengan bobot SKS yang harus ditempuh mahasiswa FISIP UI dan FISIPOL UGM. Meski bobot SKS-nya memiliki kesamaan, tetapi muatan kurikulumnya sangat berbeda. Menurut Bahtiar, mahasiswa di fakultasnya tak hanya mempelajari disiplin ilmu politik dan ilmu sosial yang esensial, tetapi mereka juga mempelajari pengetahuan mengenai dasar-dasar keislaman.

"Di sini kita berikan matakuliah yang menjadi bagian

disiplin ilmu politik yang diajarkan di beberapa universitas di dalam maupun di luar negeri. Di sini juga diajarkan dasar-dasar keislaman. Jadi Islam menjadi faktor penting dan direfleksikan dalam bangunan kurikulum non-Islam. Melalui pemberian matakuliah keislaman maka tingkah laku, sikap, dan pandangan mahasiswa tentang politik tentu akan berbeda dengan mahasiswa fakultas sejenis di perguruan tinggi lain,” terangnya.

Bahtiar menjelaskan, di program sarjana FISIP UIN Jakarta mahasiswa sudah diajarkan beberapa matakuliah mengenai Islam seperti Politik Islam, Partai Islam, Hubungan Islam dan Politik, Hubungan Islam dan Negara, dan Politik di Dunia Islam. Menurutnya, beberapa matakuliah tersebut tidak diajarkan di program strata satu FISIP perguruan tinggi lain. Jika ingin memperoleh matakuliah keislaman maka ada di program pascasarjananya.

Perbedaan lainnya, kata Bahtiar, matakuliah yang diajarkan di sini bersifat dasar dan komprehensif serta belum ada pembedangan. FISIP UIN Jakarta tidak memberikan pembedangan khusus di program strata satu. Di program sarjana FISIP UI mahasiswa sudah diberikan pembedangan, yakni pembedangan politik dan demokratisasi di Indonesia, dan perbandingan politik. Sedangkan di UIN Jakarta pembedangan baru akan diadakan pada saat FISIP membuka program pascasarjana.

Bahtiar mengungkapkan, kurikulum FISIP UIN Jakarta disusun setelah mempelajari struktur kurikulum lembaga sejenis di sejumlah universitas terkemuka di tanah air dan luar negeri seperti Harvard University Amerika Serikat, Stanford University Amerika Serikat, University of Western Sydney Australia dan Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. “Stukturnya kita rumuskan sendiri. Jadi bukan mengadopsi dari luar,” tegasnya.

Bahtiar menginginkan keberadaan FISIP UIN Jakarta bisa memberikan kontribusi dalam bidang sosial dan politik yang baik, bahkan lebih baik, dari lembaga yang sudah ada. Keberadaan FISIP UIN Jakarta ingin melengkapi dan mengisi hal-hal yang selama ini kurang menjadi perhatian. Ia mencontohkan, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki banyak partai Islam, fenomena tersebut penting untuk diketahui.

Menurut Bahtiar, fenomena tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kacamata disiplin ilmu politik modern, seperti dari segi *voting behaviour*, kelembagaan, dan tujuannya. “Mereka Islam. Maka, kita akan melihat apa yang mendasari secara keagamaan sehingga partai Islam berdiri. Nah, di sini kita ajarkan kepada mahasiswa mengenai hal itu. Ini kesempatan sekaligus tantangan buat kita,” ungkapnya.

Doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat, ini meminta masyarakat supaya tidak ragu terhadap FISIP UIN Jakarta. Sebab fakultas ini sudah memiliki modal/sumber daya yang cukup memadai. Ia menegaskan, sebelum FISIP berdiri, UIN Jakarta sudah memiliki dosen-dosen yang ahli dalam bidang ilmu politik dan ilmu sosial, misalnya Din Syamsudin, Saiful Mujani, dan Bambang Pranowo. Di samping itu, beberapa dosen UIN Jakarta juga sudah tampil sebagai pengamat politik di pentas nasional. Bahkan pelopor survei politik di Indonesia adalah dosen UIN Jakarta, yakni Saiful Mujani. “Jadi jika masyarakat meragukan berarti mereka tak mengetahui sumber daya yang dimiliki UIN Jakarta,” tegasnya.

Ia mengakui walaupun lembaganya memiliki sumber daya unggul tapi kuantitasnya masih minim. Sumber daya yang tersedia di sini belum ideal layaknya di fakultas serupa di perguruan tinggi lain. Walaupun demikian, ia menilai tenaga yang dimilikinya sekarang sudah cukup. Bahkan dosen antropologi sudah dimilikinya meski prodinya belum dibuka. Dia akan mendorong para dosen untuk meraih gelar doktor, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bahtiar mengakui, usia FISIP memang relatif muda. Maka, dirinya perlu belajar dari fakultas sejenis kampus lain. Beberapa bulan yang lalu, Bahtiar berkunjung ke Montreal Kanada un-





tuk mempelajari politik identitas. Bahtiar juga bertandang ke Universitas Islam Antarbangsa Malaysia untuk melihat praktik kombinasi keilmuan antara ilmu Islam dan ilmu non-Islam.

Untuk memperkuat dan menunjang kelembagaan di masa depan, Bahtiar berencana membuat Pusat Studi Cina. Pusat studi ini bukan untuk mempelajari atau kursus bahasa Cina, melainkan untuk mengkaji isu ekonomi, politik dan isu strategis lainnya, karena Cina dinilai sebagai negara yang potensial dan memiliki kekuatan di dunia. Selain akan membuka Pusat Studi Cina, FISIP juga akan membuat Pusat Studi Indonesia-Malaysia.

“Kita juga sedang memikirkan agar FISIP bisa menjadi Pusat Studi Timur Tengah karena di Indonesia belum ada yang ahli tentang itu. Ahlinya memang belum ada, maka nanti kita akan kirim dosen untuk belajar strata dua atau strata tiga mengenai kajian Timur Tengah. Sekarang aneh, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar tapi tak ada yang ahli Timur Tengah,” cetusnya.

FISIP UIN Jakarta masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Di antara masalah yang dihadapi terkait perizinan birokrasi. Menurut Bahtiar, dalam mengurus perizinan birokrasinya lumayan sulit dan ribet sehingga mengakibatkan struktur lembaganya belum sempurna.

Tantangan selanjutnya mengubah mentalitas mahasiswa. Bahtiar ingin mahasiswa ikut mengembangkan atmosfer akademik sehingga FISIP dapat berjalan baik. Salah satu caranya melalui kegiatan seminar atau diskusi yang mengundang para pakar. Sekarang FISIP sedang merencanakan program *lecture series on democracy* yang mengundang sejumlah ahli untuk berbicara mengenai demokrasi dari berbagai aspeknya. Di antara tokoh yang menjadi narasumber; Wakil Presiden Boediono, Mantan Presiden BJ Habibie, Salim Said, dan pengusaha Arifin Panigoro. “Diskusi ini untuk menggugah mahasiswa bahwa kita serius menangani FISIP,” tegasnya.

Bahtiar juga akan mendorong mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ia meminta mahasiswa berkuliah di sini maksimal lima tahun atau sepuluh semester supaya mereka bisa cepat terjun ke masyarakat. Mengenai prospek lulusannya, ia mengatakan, sangat terbuka lebar. Menurutnya, lulusan FISIP UIN Jakarta bisa dimanfaatkan ke mana saja, tak hanya

difokuskan untuk menjadi ahli politik Islam, tapi juga bisa menjadi politisi, birokrat, diplomat, surveyor, dan lainnya.

Bahtiar yakin FISIP bisa menjadi fakultas andalan di UIN Jakarta. Sebab, dalam empat hingga lima tahun terakhir banyak orang UIN yang terlibat dalam persoalan politik nasional. “Kita *pede* pasti bisa. Tanpa FISIP saja kita sudah masuk ranah politik, apalagi setelah adanya FISIP. Saya kira ke depan orang melihat bukan sekadar alternatif, tapi menjadi pilihan utama. Jadi kita akan berkompetisi secara baik dengan FISIP lain yang sudah lama berdiri,” ucapnya. □ AKHWANI SUBKHI



# Minim SDM, Tetap Raih **Kemajuan**

Sejak awal berdiri, SDM FISIP memang minim. Mutasi dan rekrutmen terus diupayakan. Kuantitas dan kualitas mereka pun ditingkatkan dengan kerjasama berbagai pihak. Bagaimana hasilnya.

RUANG SEMPIT ITU ditempati cukup hanya beberapa orang. Yang memisahkan satu orang dengan yang lain hanya sekat pembatas. Bertumpuk buku yang telah rampung cetak diletakkan di sudut ruangan. Sesekali pintu ruangan dibuka mahasiswa maupun dosen yang berkepentingan di ruang Bagian Tata Usaha FISIP.

Aktivitas sivitas akademika FISIP sejak setahun lalu memang masih menempati ruangan di Fakultas Psikologi (FPsi). FISIP masih 'nebeng' di beberapa ruang FPsi. Setidaknya FISIP menggunakan delapan ruang kelas dan tiga ruang kantor untuk aktivitas belajar dan mengajarnya. Itu juga yang menjadi alasan sumber daya manusia (SDM) FISIP sekarang masih terbatas.

FISIP yang mulai beroperasi tahun akademik 2009/2010

merupakan gabungan dari tiga program studi yang sebelumnya berada di fakultas lain. Mahasiswa dan dosen yang tadinya belajar mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)—kini Fakultas Ushuluddin (FU) dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)—kini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), ikut 'bermigrasi' ke FISIP.

Pada awalnya, berdasarkan data Lembaga Peningkatan Jaminan Mutu (LPJM), jumlah dosen yang dimiliki FISIP, baik dosen tetap maupun tidak tetap, berjumlah 63 orang yang terdiri dari 48 laki-laki dan 15 perempuan. Mereka berlatar belakang pendidikan magister 45 orang dan 18 orang bergelar doktor. Jika dilihat dari jenjang kepangkatan akademik, 63 orang tersebut terbagi menjadi 12 orang berpangkat asisten ahli, 26 orang berpangkat lektor, 20 orang berpangkat lektor kepala, dan 5 orang gurubesar.

Dengan bekal SDM yang merupakan tokoh-tokoh yang dikenal publik, FISIP percaya diri akan menjadi fakultas yang maju dan mapan. "Kita memiliki tenaga pengajar cukup kuat dan kompeten di bidangnya. Mereka lulusan perguruan tinggi terkemuka, seperti Ohio University dan McGill University. Soal tenaga pengajar, FISIP tidak akan kekurangan. Bahkan salah satu latar belakang pembukaan FISIP ini karena kesiapan tenaga pengajarnya itu," jelas Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr Jamhari, MA.





Sebagai fakultas baru, FISIP tentu tidak hanya membutuhkan tenaga dosen, tapi juga tenaga administrasi. Tenaga administrasi adalah para pelaksana seluruh kegiatan yang terkait dengan manajemen keseharian di fakultas. Hal ini mencakup bidang-bidang umum, keuangan, sekretariat, dokumentasi dan data, rumah tangga, dan keamanan serta bidang-bidang lain. Awalnya, FISIP hanya memiliki 12 tenaga administrasi: delapan laki-laki dan empat perempuan. Latar belakang pendidikan mereka mencakup dua orang SMA dan 10 orang bergelar sarjana.

Dengan tenaga administrasi yang sangat minim jumlahnya, mereka harus melayani 625 mahasiswa. Menurut Dekan FISIP Prof Dr Bahtiar Effendy, sejak awal dibuka, FISIP memang memiliki sumber daya manusia, khususnya tenaga administrasi, yang kurang memadai. Namun, FISIP merasa memiliki modal, dengan tenaga pengajar yang menguasai di dalam bidangnya, yang cukup untuk menjadi fakultas yang mandiri.

“Banyak dari luar kampus yang akan membantu FISIP. Jadi, saya kira akan mudah mengembangkan FISIP. Kita akan mendorong para dosen untuk memperoleh kesempatan melanjutkan studi program S3 di dalam dan di luar negeri. Selama ini, kita sering membantu orang-orang di luar kampus untuk memperoleh beasiswa, *masa* orang dalam UIN sendiri tidak bisa kita upayakan. Saya tidak risau. Meskipun SDM kita belum cukup, tapi modal dasarnya sudah ada,” jelas Bahtiar.

Apa yang dikatakan Bahtiar mulai direalisasikan dalam

beberapa bulan belakangan. Setelah FISIP setahun berjalan, jumlah tenaga dosen maupun administrasi mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan. Sedikit demi sedikit FISIP mulai melingkupi kekosongan SDM itu.

Berdasarkan data Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian FISIP, jumlah dosen FISIP yang sebelumnya 63 orang kini menjadi 78 orang. Dengan komposisi, dosen tetap 28 orang--tujuh orang mengajar di Prodi HI, 14 orang di Prodi IPol, dan tujuh orang di Prodi Sosiologi. Selain dosen tetap, ada juga dosen tidak tetap. Paling banyak dimiliki Prodi HI sebanyak 26 orang. Sementara Prodi IPol dan Prodi Sosiologi masing-masing enam dan 12 orang.

Peningkatan SDM juga dialami tenaga administrasi. Karyawan yang tadinya 12 orang, kini berjumlah 18 orang. Lima orang di antaranya adalah pegawai yang direkrut dengan menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU). Sementara karyawan dengan status PNS ada sembilan orang, di antaranya Kabag TU Drs Amri Rasyidin, MPd, Drs Zamzami Kiram, MM, Dra Supriati, Liliek Rahmawati, S.Ap, Noviati, SE dan Drs Rahmat. Tenaga administrasi yang bukan PNS ada empat orang, tiga orang petugas kebersihan dan seorang tenaga supir.

Menurut Amri, kekurangan SDM yang dialami FISIP diatasi dengan melakukan mutasi dosen lama yang ada di fakultas asal tiga prodi yang direposisi. Selain itu, FISIP juga memanfaatkan tenaga dosen tidak tetap yang ada di fakultas maupun universitas lain. Tapi, ada juga dosen yang



merupakan tenaga kontrak yang selalu diperbaharui kontraknya jika diperlukan. Selain itu, FISIP menerima dosen melalui proses tes CPNS. Penambahan SDM akan menjadi fokus FISIP ke depan. Dosen tetap akan terus diperbanyak, sampai perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 1:20.

Dengan tenaga dosen dan administrasi yang seadanya itu, mereka tetap bersemangat menangani mahasiswa FISIP. Hingga semester ganjil tahun akademik 2010/2011, FISIP memiliki 916 orang. Dr Jamhari menyatakan, FISIP beruntung sebab dalam proses perekrutan mahasiswa baru sudah ikut Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Masuk Bersama (UMB). “Saya kira respon cukup bagus dan pendaftarannya untuk tiga program studi di FISIP sangat tinggi. Saya kira dengan dekannya seorang *public figure* itu pada dasarnya seperti promosi gratis bagi FISIP UIN Jakarta,” ucapnya.

Jamhari mengakui, pengajar FISIP memang masih kurang. Kekurangan itu tertutup dengan banyak dosen FISIP yang selesai belajar di perguruan tinggi di luar negeri seperti Australia, Eropa dan Amerika. Mereka kini telah kembali ke FISIP, dan memperkuat barisan dosen yang telah ada sebelumnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, baik dosen, tenaga administrasi, maupun mahasiswa, FISIP melakukan banyak kerjasama. Beberapa waktu lalu jajaran rektorat bersama dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy, berangkat ke Selandia Baru untuk menandatangani MoU dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. MoU

ini berisi mengenai kesepakatan pertukaran (*exchange*) mahasiswa maupun dosen, serta program *double degree*. Dengan kerjasama ini, lulusan FISIP bisa mengambil kuliah pada tahun keempat di New Zealand. Dan juga akan ada dosen tamu dari Victoria University of Wellington. Selain itu, kerjasama dengan University of Western Sydney dengan Prodi HI dalam hal yang sama, program *double degree* maupun *exchange*.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, FISIP juga akan melakukan kerjasama dengan komunitas Cina, berkaitan dengan akan dibangunnya Center for Chinese Studies, yang memfokuskan pada kajian perkembangan politik dan ekonomi Cina. “Saya kira ini akan bagus sekali. Selain itu ada kerja sama dengan McGill University dan European Union. FISIP cukup agresif,” jelas Jamhari.

Dekan FISIP, pada akhir tahun lalu, juga mengunjungi Amerika atas biaya The Asia Foundation dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Di Amerika Serikat, dia mempelajari kembali prodi-prodi di bidang politik dan sosial di sejumlah universitas yang mengelola program S1. Ia mempelajari, misalnya, matakuliah apa saja dan buku-buku apa saja yang menjadi rujukan.

FISIP, dengan sumber daya manusia yang relatif minim, tetap terus berpacu menuju perkembangan dan kemajuan. Dosen, tenaga pengajar, dan mahasiswa—meski jumlah mereka terbatas, terus melakukan perubahan dan inovasi di dalam proses belajar-mengajar. Demi masa depan FISIP![]

ELLY AFRIANI



# Agenda-Agenda Akademik Prestisius

Termuda tapi banyak berkarya. Tahun ini penuh agenda akademik. Mulai dari kuliah serial demokrasi, pembukaan pusat kajian Cina, hingga penjeramahan buku-buku. Persiapannya sudah matang.

JAJARAN DEKANAT, DOSEN, mahasiswa, karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), para pimpinan rektorat dan para tamu berkumpul di Auditorium Prof Dr Harun Nasution Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pukul 14.50, Kamis, 23 Desember lalu. Mereka mengikuti salah satu kegiatan akademik yang diselenggarakan FISIP.

Saat itu, Wakil Presiden RI Boediono mendapat giliran awal memberikan kuliah umum *Lecture Series on Democracy* bertema “Ekonomi dan Demokrasi”. “Kami memang akan melakukan agenda akademik besar berupa *Lecture Series*

*ofn Democracy*,” ungkap Dekan FISIP Prof Dr Bahtiar Effendy.

Inilah program akademik awal yang merupakan rangkaian kuliah yang akan disampaikan oleh tokoh-tokoh ternama dan kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas tentang demokrasi dilihat dari berbagai perspektif.

Menurut Bahtiar, selain Prof Dr Boediono, para tokoh yang akan hadir pada *Lecture Series on Democracy* itu, di antaranya; Prof Dr B.J. Habibie, Dr Marty Natalegawa, Prof Dr Mahfud MD, Arifin Panigoro, Prof Dr Fasli Jalal, Prof Dr Salim Said, Jacob Oetama, Taufik Kiemas, Dr Mely G. Tan, dan Prof Dr Franz Magnis-Suseno.

Boediono telah berbicara tentang ekonomi dan demokrasi. Nanti, mantan Presiden B.J. Habibie akan menjelaskan tentang teknologi, industri, dan demokrasi. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D tentang konstitusi dan demokrasi. Wartawan senior Jacob Oetama tentang media massa dan demokrasi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik Kiemas tentang Pancasila dan demokrasi, dan akademisi Franz Magnis-Suseno





tentang kaum cendekiawan dan demokrasi.

Tentang tema militer dan demokrasi akan disampaikan pengamat militer Prof Dr Salim Said. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memberikan kuliah mengenai kebijaksanaan luar negeri dan demokrasi. Pengusaha Arifin Panigoro berbicara tentang bisnis dan demokrasi. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof Dr Fasli Jalal mendapat giliran menjelaskan pendidikan dan demokrasi. Tentang perempuan dan demokrasi dipaparkan akademisi Dr Mely G. Tan. Sedangkan tema Muslim moderat dan demokrasi akan disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Dr Hassan Wirajuda.

Bagi FISIP, fakultas termuda di UIN Jakarta, menyelenggarakan hajatan besar di bidang akademik semacam ini bukan menjadi soal. Agenda akademik yang dilakukannya telah dipersiapkan dengan matang. “Semuanya akan terlaksana dengan baik. Kita perlu kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak,” ungkap Bahtiar. Bahtiar berharap semua pihak, terutama seluruh sivitas akademika FISIP, mendukung agenda besar tersebut sehingga acaranya sukses sesuai rencana. “Acara ini juga bekerjasama dengan The Asia Foundation,” lanjut Bahtiar.

Acara berkualitas dan bergensi tersebut merupakan rangkaian acara yang berbicara tentang demokrasi dari berbagai sudut pandang, yang baru dilakukan FISIP. Tujuannya, ungkap Bahtiar, adalah untuk membangkitkan minat mahasiswa terhadap tema-tema demokrasi dan mempromosikan FISIP UIN Jakarta sebagai fakultas baru agar lebih dikenal di masyarakat dan menjadi bagian dari kontribusi intelektual sivitas akademika FISIP UIN Jakarta.

“Ini dalam rangka membuka pemikiran mahasiswa bahwa kita serius dengan kerja akademik kita, dan bah-

wa di sana banyak orang yang kompeten yang mau membantu kita. Dengan demikian, mudah-mudahan mahasiswa mau tergerak untuk mempelajari bidang studinya secara serius,” kata Bahtiar. Nantinya, papar Bahtiar, makalah-makalah yang disampaikan para tokoh dan akademisi itu akan diterbitkan dalam bentuk buku.

Rencana awal, kegiatan tersebut akan dilaksanakan dimulai pada September 2010 lalu sampai Agustus 2011. Namun, karena

masih ada beberapa kendala, kegiatan akademik itu baru bisa dimulai pelaksanaannya pada akhir tahun ini. “Insya Allah acaranya akan kami laksanakan hingga 2011,” ungkap Bahtiar. Acara tersebut akan belangsung di Auditorium Prof Dr Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 500-an peserta, yang terdiri dari mahasiswa dan para pimpinan universitas, fakultas, dan tamu undangan.

Fakultas termuda di lingkungan UIN Jakarta ini tak hanya membuat gebrakan akbar di dalam bidang akademik. FISIP kini merancang proyek penerjemahan buku-buku bahasa Inggris dan pembukaan Pusat Studi Cina yang menitikberatkan pada ekonomi, politik, dan isu-isu strategis lainnya. “Supaya mahasiswa memiliki cara berpikir seluas cakrawala. Ini sekalian juga berguna mempromosikan UIN Jakarta di kancah nasional maupun internasional,” ungkap Bahtiar.

Masih di bidang akademik, FISIP akan ‘menggalakkan’ penelitian untuk dosen-dosen tentang kecenderungan keagamaan di kalangan mahasiswa. Pada 2010 ini, FISIP juga telah mengadakan penelitian dengan biaya Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema yang diteliti, antara lain, mahasiswa dan arus keberagaman: identitas perkembangan pemikiran dan perilaku keberagaman di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga, penelitian bertema distingsi FISIP untuk merumuskan karakteristik FISIP UIN Jakarta di antara ilmu sosial dan keislaman, strategi penanganan terorisme di Asia Tenggara, perkembangan birokrasi di Indonesia pasca-reformasi, dan strategi resolusi konflik di Indonesia pasca-reformasi.

Program akademik lainnya, FISIP akan mengadakan pertukaran dosen yang didatangkan dari perguruan tinggi



di luar negeri untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada mahasiswa FISIP. “Rencananya, kami akan mengadakan pertukaran dosen dari New Zealand yang akan mengajar bahasa Inggris selama tiga bulan di sini,” ungkapnya.

Ke depan, di FISIP, matakuliah bahasa Inggris bukan hanya matakuliah wajib yang hanya diberikan dua kali dalam setahun, tetapi nantinya akan ditambahkan paling sedikitnya empat atau enam kali dalam setahun. “Saya ingin mahasiswa FISIP bisa berbicara dan memahami bahasa Inggris dan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa internasional,” harap Bahtiar.

Untuk bahasa Arab, ungkap Bahtiar, FISIP sedang menjajaki kerjasama dengan LIPIA untuk tenaga pengajar bahasa Arab. “Mudah-mudahan LIPIA bisa menyumbangkan tenaga pengajarnya,” ungkapnya penuh harap. Menurut Bahtiar, bahasa Arab adalah bahasa yang harus dikuasai oleh mahasiswa UIN Jakarta. Karena yang membedakan lulusan FISIP UIN dan FISIP lainnya adalah keislamannya. Sumber-sumber pengetahuan keislaman banyak didapatkan dalam literatur bahasa Arab. Siapa tahu juga ada dari mahasiswa yang ingin mendalami dan menjadi ahli Timur Tengah. Kalau tidak bisa berbahasa Arab kan tidak akan bisa,” tuturnya.

Karenanya, ke depan, program kerja akademik akan memerhatikan dengan serius kurikulum-kurikulum yang akan diberikan. Seperti matakuliah Tilawah al-Quran dan Praktik Ibadah akan dimaksimalkan. “Mereka harus bisa kedua matakuliah tersebut. Ini kan untuk mengubah mentalitas mahasiswa,” tandasnya.

Selain itu, untuk menjadi penunjang terlaksananya agenda kerja akademik yang menjadi tonggak utama, FISIP menyediakan perpustakaan dengan konsep yang berbeda dengan perpustakaan yang ada di UIN Jakarta. “Di gedung yang baru nantinya, kami akan memiliki dua lantai perpustakaan, masing-masing 200 atau 250 meter yang akan kami jadikan ruang perpustakaan. Perbedaannya dengan perpustakaan yang ada di UIN, nanti buku-bukunya tidak boleh dipinjam keluar dan hanya boleh dibaca di ruangan (*closed reserve*). Karena buku-buku yang kami sediakan adalah buku-buku pilihan

yang cocok dikonsumsi mahasiswa FISIP, dan bukan buku umum. Kalau untuk mencari buku umum biarlah mereka ke perpustakaan umum seperti Perpustakaan Utama yang ada di UIN,” lanjutnya.

Dengan demikian, Bahtiar berharap, dengan adanya program dan kegiatan akademik yang sangat terkonsep dengan baik, juga sarana-sarana yang menunjang pembelajaran di FISIP, mahasiswa lebih semangat belajar dan menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. “Jangan sampai lulus setelah mereka di semester 16 ke atas. Kita akan dorong mahasiswa untuk semangat belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Ini memang berat, tapi kami optimis,” ungkap Bahtiar semangat. □ IRADATUL AINI





## Menjadi Pelopor Revolusi Hijau

Rampung akhir 2011. Konsepnya dirancang menjadi kampus hijau (*green bulding*). Menghindari pemborosan energi dan listrik serta kebiasaan hidup tidak ramah lingkungan.

PERNAH KE KAMPUS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Jalan Kertamukti? Bila melintasi jalan tersebut, Anda pasti melihat gedung yang sedang dibangun. Bangunan itu berada di atas lahan yang awalnya milik Pemprov Jawa Barat, yang kini pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada UIN Jakarta.

Luas bangunan itu 12.000 meter persegi. Berdiri di atas lahan sekitar 10.000 meter persegi. Anggaran yang direncanakan sekitar Rp 90 milyar. Sebenarnya, proses pembangunan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu telah dimulai Selasa, 5 September 2010. Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali yang meletakkan pamanangan tiang pertama pembangunan gedung tersebut, disaksikan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dekan FISIP Prof. Dr. Bahtiar Effendy, para dosen,

tenaga administrasi, serta tamu-tamu undangan.

Rencananya, gedung itu berlantai enam. Dirancang oleh sebuah tim khusus yang berasal dari UIN Jakarta. Hasil rancangan itu kemudian dikerjakan konsultan perencana dari PT Arkonim, konsultan manajemen dari PT Bina Karya, serta kontraktor dari PT PP Persero.

Gedung ini akan dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama merupakan kerangka (rancangan) gedung secara umum. Tahap kedua, mulai membangun dinding, interior, lantai, dan seterusnya. Tahap ketiga, pembangunan taman, mushalla, masjid khusus, café dan kantin, serta fasilitas lainnya.

Menurut Amri Rasyidin, Kepala Bagian Tata Usaha FISIP—yang juga salah satu tim perencana pembangunan gedung FISIP—sejauh ini, proses pembangunan gedung FISIP sudah memasuki 40% tahap penyelesaian. Rencananya, akhir 2011, gedung ini sudah bisa digunakan untuk proses belajar-mengajar.

Apa kelebihan gedung FISIP dibanding gedung-gedung fakultas lainnya di lingkungan UIN Jakarta? Amri mengakui bahwa dari segi materialnya tentu saja akan lebih bagus. Laboratorium komputernya juga lebih canggih. Dan, yang lebih penting, konsepnya dirancang menjadi kampus

hijau (*green bulding*).

Sivitas akademika FISIP tentunya gembira dan senang menyambt pembangunan gedung baru itu. “Rumah sendiri lebih enak, nyaman, dan baik daripada menumpang di rumah orang lain,” kata mereka. Sebagian besar mahasiswa FISIP, secara psikologis, memiliki perasaan tidak enak, bahkan cenderung tidak percaya diri, karena selama ini harus menumpang belajar di ruang kelas Fakultas Psikologi.

Yeni Aryati, misalnya, mengungkapkan rasa senangnya karena sebentar lagi akan memiliki gedung sendiri. “Senang banget punya gedung sendiri. Kalau bisa secepatnya selesai deh..he...he...! Entah kenapa ada perasaan *enggak* enak *aja* karena kita numpang di fakultas orang lain. Istilahnya *nggak* bebas juga kan kalau kita mau memakai ruangnya. Repot di perizinannya. Makanya, kalau mau mengadakan acara-acara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), misalnya, biasanya kita meminjam tempat di Kampus I,” terang mahasiswa Prodi Hubungan Internasional ini.

Syamsul Bachtiar, mahasiswa Prodi Ilmu Politik, tak kalah senangnya. Ia berharap dengan adanya gedung yang baru, mahasiswa FISIP lebih mudah dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. “Syukurlah, FISIP punya gedung sendiri. Bahkan seharusnya gedung itu sudah ada dari dulu. *Nggak* enak juga sih kita numpang sama Fakultas Psikologi. Untuk mencari referensi bacaan pun, kita harus ke perpustakaan Fakultas Ushuluddin atau Perpustakaan Utama di Kampus I. Kita kan belum punya perpustakaan

sendiri,” ungkapnya.

Gedung baru FISIP dirancang dengan konsep *green building*. Artinya, gedung FISIP akan diorientasikan pada konsep ramah lingkungan, dengan menghemat energi listrik. Misalnya, penggunaan *air conditioner* (AC) dikurangi dan diganti dengan kipas angin biasa, taman tempat resapan air diperbanyak, dan tentunya tata ruangnya pun disesuaikan.

Semua ruangan di gedung lebih banyak menggunakan pencahayaan alami. Ventilasi di setiap ruangan diperbanyak, sehingga cahaya matahari serta udara segar lebih mudah menembus ke dalam ruangan. “Iya. Pokoknya sebisa mungkin penggunaan AC itu dikurangi, baik di kelas maupun di ruangan lainnya. Makanya tata ruangnya harus dirancang sedemikian rupa, supaya tetap memberikan kenyamanan dalam proses belajar-menagajar. Yah ... bagaimana caranya supaya hemat energi tapi tetap *adem* juga,” tutur Amri.

Konsep *green building* ini tentu patut diapresiasi, di tengah semakin maraknya pemborosan energi dan listrik, serta kebiasaan hidup konsumtif mahasiswa yang tidak ramah lingkungan. Tengok saja kondisi kampus pada umumnya, masih sedikit sekali yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Memang ada beberapa kampus yang sudah mulai melakukan revolusi hijau, misalnya dengan kebijakan bersepeda atau berjalan kaki di lingkungan kampus. Tapi itu saja tak cukup, karena harus didukung pula



dengan penghematan sarana dan prasarana kampus yang berbasis energi dan listrik, serta ditunjang oleh kebiasaan dari para penghuninya.

Tak perlu jauh-jauh, lingkungan kampus UIN sendiri masih belum memenuhi kategori ramah lingkungan. Coba saja masuk ke ruangan staf atau dosen, terkadang AC dan komputernya dalam keadaan hidup sementara tidak seorang pun di ruangan tersebut. Selain itu, belum ada pemisahan tempat sampah organik dan non-organik, kurang tersedia taman sebagai tempat resapan air, kebiasaan mahasiswa *nongkrong* sambil merokok di hampir semua sudut kampus, dan seterusnya.

Dalam pembangunan gedung FISIP, sarana dan prasarananya tetap memperhitungkan kebutuhan para penghuninya. Sebagaimana di fakultas lain yang ada di UIN, di gedung FISIP disediakan mushalla di setiap lantai. Yang membedakan, di FISIP disediakan pula masjid dengan ukuran yang cukup besar di bagian *center* gedung. Selain itu, disediakan pula ruangan khusus untuk merokok, sehingga tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Café dan kantin tempat makan dan minum pun dirancang dengan konsep ramah lingkungan.

Menurut Bara Ilyasa, presiden BEM FISIP, fasilitas untuk mahasiswa dirancang lebih bagus dan lebih banyak. “Alhamdulillah, gedung FISIP sebentar lagi selesai. Yang jelas, kami senang sekali menyambut konsep *green building*. Konsep ini bagus sekali, dan saya pikir sudah seha-

rusnya kita menerapkan konsep itu di setiap kampus. Dengan mengurangi penggunaan listrik, dan lebih banyak mengandalkan penerangan alami, yaitu cahaya matahari, memperkecil frekuensi penggunaan AC, kita sudah dapat menghemat, sekaligus ikut menjaga kelestarian lingkungan kita,” tuturnya.

Bara menambahkan, untuk mendukung kegiatan mahasiswa, sarana dan prasana untuk itu pun disediakan. Salah satunya, ruangan khusus untuk kegiatan BEM. “Dengan begitu, tentu saja harapannya ke depan mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik dan lebih kondusif, karena telah dilengkapi dengan sarana penunjang. Selain itu, kami juga berharap pembangunan di FISIP dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya gedungnya, tapi juga dari segi peningkatan kualitas mahasiswanya,” tambahnya.

Dengan merancang konsep *green building*, seluruh sivitas akademika FISIP “dituntut” untuk lebih melakukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada penjagaan lingkungan, karena gedung dan fasilitas pelengkap lainnya saja tidak cukup untuk mewujudkan *green environment*. Yang tak kalah penting adalah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang ramah lingkungan. Dengan begitu, FISIP menjadi pelopor revolusi hijau, sekaligus contoh bagi fakultas lain di UIN pada khususnya, dan di kampus lain pada umumnya. []

MILASTRI MUZAKKAR



## Menjadi Imej **BEMF** Percontohan

FISIP baru saja memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Lahir dari aspirasi mahasiswa. Proses perjuangannya cukup alot. Wadah ini dibutuhkan mahasiswa.

KONTESTASI POLITIK TIDAK hanya menjadi milik para politisi. Mahasiswa juga tak lepas, bahkan terkadang lebih sengit, daripada dinamika politik yang terjadi di Senayan. Tampaknya hal ini sangat disadari pihak dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pihak dekanat menilai proses Pemira (Pemilu Raya) di kampus sangat “berbau” politis, dan cenderung tidak mendidik. Bahkan, Pemira cenderung memicu konflik antar-mahasiswa yang tak berkesudahan. Kampus, khususnya FISIP, bukan tempat berpolitik. Mahasiswa lebih baik belajar dan mengembangkan intelektualitasnya secara akademik, bukan berpolitik praktis.



Pihak dekanat melihat, praktik politik yang dikembangkan mahasiswa melalui BEM belum sesuai dengan teori yang dipelajari mahasiswa FISIP. Konsep trias politika belum dijalankan sepenuhnya. Bahkan, nomenklatur yang digunakan di dalam BEM sering rancu. Sebut saja, misalnya, nomenklatur “presiden” yang dipakai setiap tingkatan; dari BEM Universitas, Fakultas, hingga BEM Prodi/Jurusan. “Ini kan berarti ada negara di dalam negara. Seharusnya kan istilah presiden untuk BEM Universitas, gubernur untuk BEM Fakultas, dan bupati atau walikota untuk BEM Prodi/Jurusan,” kata seorang dosen FISIP yang tak mau disebut namanya.

Menurut Bara Ilyasa, Presiden BEM FISIP, wacana awal yang berkembang, BEM ini akan dijadikan sebagai percobaan untuk beralih ke sistem senat. Namun, mahasiswa FISIP justru lebih menginginkan tetap diberlakukannya sistem Pemira kampus. Mereka menginginkan FISIP ikut berpemilu raya. Beberapa perwakilan mahasiswa pun beraudiensi ke dekanat untuk membicarakan rencana ikutnya FISIP di pemilu, sehingga bisa terbentuk BEMF.

Keinginan tersebut semakin kuat, karena sebelumnya program studi (prodi) yang ada di FISIP sudah mempunyai BEM sendiri. Ketiga BEM itu merupakan hasil konversi dari prodi sebelumnya. Prodi Hubungan Internasional direposisi dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)—kini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), sementara Prodi Sosiologi dan Ilmu Politik direposisi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat—kini Fakultas Ushuluddin (FU).

Gayung pun ber-sambut. Mahasiswa beraudiensi dengan pihak dekanat, yang melahirkan keputusan untuk mengikutkan FISIP ke dalam kancah Pemira. Atas izin Komisi Pemilihan Umum (KPU), FISIP pun ikut bertarung pada pemira 2009. Lima partai ikut bersaing dalam proses politik. Partai Reformasi Mahasiswa (Parma) Partai Inteletual Muslim (PIM), Partai Progresif, Partai Pergerakan Mahasiswa (PPM), dan Partai Boenga mengirimkan perwakilan masing-masing untuk bertarung memperebutkan kursi di BEM FISIP.

Seluruh partai pun mempersiapkan yang terbaik untuk memenangkan Pemira itu. Semua partai melakukan strategi-strategi seperti konsolidasi internal, membuat tim sukses di setiap kelas, publikasi melalui spanduk, leaflet, baliho, dan jurnal.

Bara, sebagai salah satu kandidat presiden dari Parma, didampingi Yeni Aryati sebagai calon wakil presiden, sangat optimis memenangkan Pemira. Mereka melihat antusiasme dan dukungan dari internal partai sangat memungkinkan untuk itu. Dan, ternyata keberuntungan berpihak kepada kedua calon ini. Setelah perhitungan suara selesai, KPU mengumumkan kemenangan Bara dan Yeni dengan perolehan suara 220 dari sekitar 500 suara. Mereka mengungguli Arlian Buana Chrissandi dan Matin Halim dari PPM (158 suara), Badri Habibi dan Saiful Agna dari Partai Progresif (28 suara), Yandi Deslatama dan Muamar dari Partai Boenga (25 suara), dari PIM (21 suara), dan 4 abstein.

Kemenangan Parma pada pemilu ini menjadi saksi lahirnya BEM FISIP pertama. Kepengurusan pun ditetapkan, dan para pengurusnya dilantik Dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy, bertepatan dengan momen final Piala Dunia, 19 Juli 2010, di lantai 4 gedung Fakultas Psikologi. Pelantikan ini dihadiri segenap sivitas akademika FISIP, serta beberapa tamu undangan. Dalam sambutannya, Bahtiar mengatakan agar BEMF bisa menjalankan fungsinya, yaitu sebagai wadah aspirasi dan berkegiatan bagi mahasiswa. Selain itu, Bahtiar juga menekankan agar BEMF tidak jatuh kepada eksklusifisme, sehingga terhindar dari gesekan-gesekan politik di kalangan mahasiswa.

Sebagaimana umumnya, struktur BEM FISIP terdiri dari departemen kemahasiswaan, penelitian dan pengembangan (litbang), seni dan budaya, departemen antar lembaga, olahraga, dan informasi dan komunikasi. Departemen-departemen ini dilengkapi dengan Lembaga Studi Otonom (LSO) yang terdiri dari LSO Bahasa, Kajian Ilmu Politik dan Sosial, dan Jurnalistik. Sebelumnya, semua persoalan kemahasiswaan ditangani langsung oleh Wakil Dekan FISIP, Dr Hendro Prasetyo.

Setelah dilantik, pengurus BEMF pun melakukan rapat kerja menyusun program kerja selama kepengurusan berlangsung. Antusiasme dan semangat para pengurus untuk melakukan yang terbaik menjadi prioritas. Beberapa program pun lahir. Misalnya, Dekan Cup antarkelas di FISIP, yang dilaksanakan di lapangan futsal, pada Sabtu dan Ahad (27-28 November 2010). Pencarian seni dan bakat, yakni mengidentifikasi bakat-bakat mahasiswa FISIP yang mungkin selama ini terpendam dan belum terasah. Pencarian itu dilakukan dengan membagikan angket kepada seluruh mahasiswa FISIP. Setelah semua angket terkumpul, pengurus BEMF menindaklanjutinya, misalnya, dengan membuat

komunitas nyanyi, tari, menulis, dan lain sebagainya.

Adapun program yang belum terlaksana meliputi English Festival tingkat prodi se-UIN Jakarta. Lomba ini terdiri dari lomba pidato bahasa Inggris, *news reading*, dan lomba karya tulis bahasa Inggris. Ada juga program seminar berkala tentang pemikiran. Setiap bulan, BEMF akan menghadirkan tokoh-tokoh pemikir nasional untuk memberikan *lecture*.

Pada awal 2011, BEMF bekerjasama dengan Yayasan Paramadina akan mengadakan bedah buku *Bebas dari Patriarkisme Islam*, yang akan menghadirkan Prof Dr Musdah Mulia (dosen Pascasarjana UIN Jakarta), Syafiq Hasyim (penulis buku), dan Claire (The Asia Foundation). Masih pada bulan yang sama, BEMF berencana menerbitkan jurnal untuk FISIP. Sejauh ini, tulisan-tulisan sudah terkumpul. Sementara program-program lainnya, seperti pelatihan jurnalistik, bazar buku, festival kebudayaan Nusantara, pembuatan majalah dinding (*mading*) untuk info

terkait FISIP, dan acara-acara tentatif lainnya, masih diusahakan agar terlaksana sebelum masa kepengurusan berakhir.

Menjadi pengurus BEMF pertama, bukan hal mudah bagi Bara beserta jajarannya. Selain dituntut membangun fondasi yang kuat, menyusun program-program dari awal, *image* "BEM percontohan" pun kerap dialamatkan kepada mereka. Namun, bagi Bara, setiap orang berhak menilai apa pun. Melakukan yang terbaik adalah fokus BEMF saat ini. "Memang agak miris mendengar kata 'percontohan', tapi itu bukan masalah. Kami ingin fokus saja pada 'pemupukan' peningkatan

SDM mahasiswa FISIP. Misalnya, latihan bahasa dan kajian-kajian. Kami ingin BEMF menjadi jembatan antara mahasiswa dengan pihak dekanat. Saya pribadi berharap bisa menjaga amanat yang diinginkan mahasiswa," ungkap mahasiswa Prodi Ilmu Politik ini.

Mahasiswa FISIP pun menggantungkan harapan yang tinggi kepada BEMF ini. Lilis, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, misalnya, menyambut kehadiran BEMF dengan penuh suka cita. Menurut Lilis, dengan adanya BEMF mahasiswa bisa mengaktualisasikan dirinya. "Saya senang bisa ada BEMF. Semoga kegiatan-kegiatannya ke depan lebih memfokuskan pada pengembangan intelektualitas mahasiswa." Harapan yang sama pun datang dari Ardi, presiden BEM Sosiologi, "Yah...baguslah ada BEMF. Artinya, *student government* ditegakkan. Ke depan semoga caranya lebih substantif, dan kehadiran BEMF ini betul-betul dirasakan oleh mahasiswa." []

MILASTRI MUZAKKAR





# Fondasi Awal FISIP sudah Selesai

Untuk 2011, FISIP telah mempersiapkan program kerja berkualitas dan bergengsi yang baru dilakukan di UIN. Apa saja program kerja 2011 yang dipersiapkan FISIP? Berikut petikan wawancara dengan Dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy.



## *Apa saja program FISIP pada 2011?*

Selain perkuliahan yang rutin dilakukan, kita juga merencanakan agenda besar berupa *Lecture Series on Democracy* bekerja sama dengan The Asia Foundation. Acara tersebut menghadirkan Wakil Presiden Prof Dr Boediono. Kita juga merancang untuk menghadirkan mantan Presiden Prof Dr BJ Habibie, Prof Dr Mahfud MD, Prof Dr Franz Magnis-Suseno, Jacob Oetama, Taufik Kiemas, dan beberapa akademisi dan praktisi politik, pengusaha, dan lainnya yang nanti akan menjelaskan tentang demokrasi. Tujuannya untuk membangkitkan minat mahasiswa terhadap tema-tema seperti ini. Mereka orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Selain itu, kita akan melanjutkan penelitian untuk dosen-dosen tentang kecenderungan keagamaan di kalangan mahasiswa. Ada pula program pertukaran dosen. Beberapa waktu lalu, sudah ada dosen dari luar negeri yang mengajar selama seminggu dan mungkin nanti juga akan datang dari New Zealand yang akan mengajar bahasa Inggris selama tiga bulan.

Kami juga akan melakukan proyek penerjemahan buku-buku berbahasa Inggris, pembukaan Pusat Studi Cina yang akan menitikberatkan pada ekonomi, politik dan isu-isu strategis lainnya. Dan kami juga akan melakukan akreditasi untuk semua jurusan.

## *Ada program khusus atau unggulan yang diprioritaskan?*

Kita tidak punya program unggulan. Dan kita tidak tahu yang mana program unggulan itu. Program-program di setiap program studi akan kami perlakukan sama. Memang, di FISIP, mahasiswa terbanyak dimiliki Prodi Hubungan Internasional (HI). Namun, bukan berarti Prodi HI itu kami unggulan dari yang lainnya. Kami samakan semuanya. Apalagi, ini periode awal pembentukan FISIP. Kami tidak bisa mengunggulkan satu sama lain antarprodi. Yang kami lakukan hanyalah melaksanakan semua program dengan maksimal yang kami bisa. Dari situ nanti kami melihat mana program yang paling diminati mahasiswa, dosen, dan kolega.

Yang paling dekat, kami akan memerhatikan keterse-



diaan perpustakaan. Di gedung baru nantinya, kami punya dua lantai perpustakaan, masing-masing 200 atau 250 meter. Nanti buku-buku di dalam perpustakaan itu tidak boleh dipinjam keluar dan hanya boleh dibaca di ruangan (*closed reserve*), karena buku-buku yang kami sediakan adalah buku-buku pilihan dan bukan buku umum. Buku umum biarlah ada di perpustakaan umum seperti Perpustakaan Utama di UIN.

*Bagaimana evaluasi yang Anda lakukan terhadap program kerja FISIP di 2010?*

Kinerja FISIP di 2010 sangat bagus meski dengan dana yang terbatas. Pada 2010, kami tidak mengadakan acara diskusi karena program kami adalah merampungkan revisi kurikulum untuk semua prodi. Kami dengan serius menggarap perbaikan kurikulum.

Program award juga tidak kami adakan dan akan kami berikan di 2011. Semua itu karena kami konsentrasi membenahi kurikulum, dosen, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan yang semuanya untuk kepentingan mahasiswa. Keinginan kami, semua kurikulum selesai ta-

hun ini. Tinggal sinkronisasi antara yang mengajar dan menyiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). SAP-SAP sekarang sedang didiskusikan dengan para dosen. Dan setelah semuanya oke, baru kita mencetaknya. Sekarang SAP Prodi Ilmu Politik sudah selesai. Menyusul SAP Prodi HI dan Prodi Sosiologi. Alhamdulillah, akhir Desember lalu semua SAP telah selesai. Pokoknya program FISIP di 2010 mencapai target sampai 90%.

*Apa yang Anda pikirkan untuk 2011?*

Harapan saya di 2011, fondasi awal FISIP sudah selesai, seperti kurikulum, aturan-aturan internal bagi dosen dan mahasiswa, akademik, kedisiplinan mahasiswa, peraturan plagiasi, perizinan masuk kelas. Semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah. Juga, bangunan gedung sudah selesai dan bisa kita tem-

pati secepatnya. Prodi HI mempunyai lulusan, dan perpustakaan yang kami rancang sudah tersedia.

Kami tahu, bahwa hal tersebut terwujud karena semua pihak bekerja keras dan saling mendukung. Mahasiswa juga membantu dengan tidak berbuat aneh-aneh. Mereka belajar dan tidak banyak menuntut karena mereka tahu bahwa FISIP memang masih darurat.[]





Ikrimah

## Mencari Informasi Lowongan Kerja

lajar ke Prodi Hubungan Internasional UIN Jakarta. Sekarang saya sudah menjadi sarjana setelah menimba ilmu selama delapan semester di sini. Saya bersyukur bisa lulus lumayan cepat dan meraih IPK 3.37 yudisium amat baik.

Skripsi saya berjudul "Peranan ASEAN Mendorong Pemerintahan Militer dalam Menegakkan Demokrasi di Myanmar". Saya tertarik meneliti tema tersebut karena pada saat pembuatan skripsi, Myanmar memiliki rencana untuk mengadakan pemilihan umum, karena itu saya ingin meneliti peranan ASEAN mengatasi masalah di negara anggotanya dan keberhasilan demokrasi di Myanmar.

Selama menjadi mahasiswa, aktivitas saya di kampus hanya kuliah. Tidak bergabung dan beraktivitas di organisasi kemahasiswaan layaknya beberapa teman sekelasku. Saya menjalani perkuliahan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pengalaman menarik saya menjadi mahasiswa mungkin di saat awal-awal kuliah yang masih berkutat dengan tugas-tugas yang menumpuk.

Setelah wisuda, saya ingin bekerja terlebih dahulu, jika suatu saat ada kesempatan ingin melanjutkan ke program magister. Sekarang saya sudah mulai mencari informasi lowongan pekerjaan agar sesuai ijazah keluar langsung bisa bekerja.

Nama saya Ikrimah. Lahir di Jakarta, 7 Mei 1987, dari keluarga sederhana. Saya "bungsu" dari lima bersaudara. Putri H.Mujtabah. Semamat sekolah menengah atas, saya memutuskan untuk melanjutkan be-

### Nadya Hajarani Dwilestari

## Ingin Bekerja di NGO Internasional

Namanya Nadya Hajarani Dwilestari tapi biasa dipanggil Nadya. Perempuan yang lahir di Jakarta, 28 Juli 1988, ini memiliki hobi membaca buku dan menyanyi. Nadya berhasil mengantongi IPK 3.64 dengan yudisium cumlaude.

*Bisa Anda ceritakan latar belakang keluarga Anda?*

Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Sejak kecil sampai sekarang, saya selalu diajarkan orangtua bahwa hidup itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya bergantung kepada orang lain. Orangtua selalu mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang sukses dan tidak bergantung kepada orang lain.

*Apa judul skripsi Anda?*

"Permasalahan *Women Trafficking* dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Periode 1998-2009". Saya tertarik dengan tema ini karena ini berkaitan dengan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan. Sejak

awal saya kuliah di Prodi Hubungan Internasional, saya sangat tertarik dengan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan saya sangat kosen dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

*Adakah temuan menarik dalam skripsi Anda?*

Sejauh ini masalah perdagangan perempuan antara Indonesia dan Malaysia tidak mempengaruhi hubungan bilateral, persoalan ini hanya dalam kerangka *people to people* bukan *government to government*.

*Bisa diceritakan pengalaman menarik yang Anda dapatkan selama kuliah?*

Bagaimana saya mengenal setiap karakter orang di sekeliling saya dan tentang bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan saya.

*Apa hal yang mengharukan bagi Anda selama di FISIP?*



Yaitu ketika saya harus kehilangan salah satu sahabat terbaik saya almarhum Nurdiansyah dalam kecelakaan ta'aruf Prodi Hubungan Internasional.

*Apa rencana Anda setelah lulus?*

Saya ingin bekerja di NGO Internasional, serta ingin melanjutkan kuliah ke program strata dua.

## Asharul Hakim

## Dikira Memiliki Banyak Pacar

Peraih IPK 3.44 ini bernama Asharul Hakim. Disapa Harul. Kuliah selama empat tahun di Prodi Ilmu Politik. Kini, ia menggondol gelar sarjana. Lulus setelah mempertahankan skripsinya "Kontestasi Gagasan Pluralisme dalam Pembahasan RUU Pornografi" dalam sidang munaqasah sebulan lalu. "Dalam proses penyusunan skripsi, saya banyak godaan dan patah semangat yang menghampiri. Misalnya wawancara narasumber susah karena tidak dapat berbagi waktu dan kesulitan mencari bahan atau data primer dan sekunder. Namun saya selalu berusaha terus dan sabar menghadapi semua itu. Karena keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat," ceritanya.

Pria kelahiran Jepara, 4 Juli 1987, ini mengaku selama kuliah dirinya dikira memiliki banyak pacar, padahal ia sejak awal masuk kuliah sampai wisuda belum pernah pacaran sama sekali. "Tidak disangkal lagi memang banyak cewek yang *naksir*

tapi saya selalu cuek, karena saya malu jalan bareng sama cewek," akunya.

Harul tak sempat aktif di organisasi kemahasiswaan layaknya beberapa temannya yang giat berorganisasi. Sembari kuliah, ia menjalankan bisnis

kecil-kecilan di bidang fashion anak muda (*distro*) bernama *Javara Collection*. Bisnis ini bernilai lumayan untuk mencari sedikit penghasilan dan melepaskan ketergantungan pada orangtua.

Pria berhobi bola basket dan *traveling* ini terkesan dengan keakraban antara dosen, mahasiswa dan karyawan di prodinya, sehingga kenyamanan akademis dan non akademis sangat terasa. Dalam perku-



liahan, penyampaian materi dosen simple tapi tetap terarah. Tugas-tugas yang diberikan para dosen membuat makalah melatih mahasiswa untuk dapat belajar secara mandiri dan lebih mendalam mengenai suatu topik dalam mata kuliah tertentu. Selain itu, ia juga dapat belajar dengan menulis karya ilmiah dengan metode dan bahasa yang baik dan benar.

## Syiqqil Arofat



Laki-laki ini kelahiran Sumenep, 1 Juli 1984. Mahasiswa Prodi Sosiologi. Syiqqil Arofat mengatakan rahasia sukses belajarnya sederhana saja. Ia tak pernah lelah membaca buku dan terus mengembangkan wawasan serta usaha keras untuk memperjuangkan dan mempertahankannya. Di samping aktivitas kuliah, ia

## Mengajar Privat dan Menjaga Warnet

pernah mengajar privat, menerjemahkan buku, dan menjaga warnet untuk mengisi waktu luang sembari menambah uang sakunya.

Dalam pandangan Syiqqil, begitu panggilan akrabnya, dalam film, sosok perempuan kerap memerankan adegan sedih dan tragis. Sosok laki-laki selalu berperan sebagai pahlawan yang mengatasi berbagai permasalahan dan membantu perempuan keluar dari jurang kesedihan. Perempuan dicap sebagai sosok lemah dan tak mampu mengatasi masalahnya. Bahkan peran demikian ditemukan juga dalam beberapa film islami.

Itulah temuan penelitian skripsi Syiqqil, berjudul "Representasi Perempuan dalam Film Bernuansa Islami; Analisis Wacana dengan Pendekatan Konstruksi Sosial". "Kecenderungan representasi itulah yang berpotensi besar memengaruhi persepsi masyarakat tentang 'yang lumrah terjadi' tadi. Kita perlu meninjau dan merefleksikan kembali konstruksi pe-

makna seperti itu untuk menghindari konsekuensi politis dan ideologis yang mungkin terjadi, sehingga tak ada pihak yang dirugikan," katanya.

Syiqqil mengaku tertarik meneliti tema tersebut karena dirinya pernah mengkaji *cultural studies* dan tertarik pada kerangka teoritis dan analisis yang digunakannya, terutama tentang konstruksi makna dan pengaruhnya pada masyarakat. Karena itu ia merasa perlu menerapkannya dalam penelitian skripsinya. Sekarang anak kedua Moh. Arifin ini berhak menyandang gelar Sarjana Sosial dan meraih IPK 3.55 dengan yudisium cumlaude.

Pengalaman menariknya, ketika ia mengajak teman-temannya untuk membuat forum kajian. Pada masa awal, teman-temannya semangat tapi lambat-laun semakin melemah. "Yah, mungkin karena mereka punya aktivitas lain di luar kampus," ceritanya. Seusai lulus, Syiqqil ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. □